

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada ,Jakarta.

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Edisi Revisi), Alumni, Bandung.

Benny K. Harman, 2013, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

F.Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV.Ganda,Yogyakarta.

Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cet. keempat, Nusa Media, Bandung.

HAS Natabaya, 2006, *Sistem Peraturan Perundang-undangan*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Ishaq, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jimly Assiddiqie, 2014, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.

Lukman Santoso Az, 2016, *Negara Hukum Dan demokrasi: Pasang Surutnegara Hukum Indonesia pasca Reformasi*, IAIN Po Press, Yogyakarta.

Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya (dikembangkan dari Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, SH.)*, Kanisius, Yokyakarta.

Maria farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisus, Yogyakarta .

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Maruar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Pranada Media Group, Jakarta .

Salsi Isra, 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Rajawali Press, Jakarta.

Soehino, 2006, *Hukum Tata Negara ,Teknik Perundang-undangan (Setelah Dilakukan Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua UUD NRI 1945)* , Edisi pertama, BPFYogyakarta, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta .

Soimin, Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Yulindri, 2006, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

D. Jurnal

Angga Prastyo, Samsul Wahidin, Supriyadi, 2020, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 11 No. 2, Edisi Agustus.

Bambang Sutiyoso, 2010, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. VII , No.6, Edisi Desember.

Draff Permohonan Judisial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 oleh Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi.

Ferry Irawan Febriansyah, 2016, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Perspektif Vol. XXI No. 3, 2016, Edisi September.

H. Ahmad Ubbe, 2005, *Instrumen Prolegnas dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Terencana dan Terpadu*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. II No.1, 2005, Edisi Maret.

Hendrik Hattu, 2011, *Tahapan Undang-Undang Responsif*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 2, Edisi Juni.

Luky Djani, 2005, *Efektivitas Biaya dalam Pembuatan Legislasi, dalam Jurnal Hukum Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, Edisi 10 Tahun III.*

Muhammad Fadli, 2018, *Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15 No.1, Edisi Maret.*

Nuzul Qur'aini Mardiya, 2017, *Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Etik, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol.VI No.1, 2017, Edisi Maret*

Putera Astomo, 2014, *Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi, Jurnal Konstitusi Vol.11 No. 3, 2014, Edisi September.*

Rahendro Jati, 2013, *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukanundang-Undang yang Responsif (Community Participation in order to Create the Responsive Law), Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. I No. III, Edisi Desember.*

Satjipto Rahardjo, 1998, *Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis, Makalah dalam Seminar "Mencari Model Ideal Penyusunan Undang- Undang yang Demokratis dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia" Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tanggal 15-16 April 1998.*

Tanto Lailam, 2015, *Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya*

Pros and Cons of the Authority of the Constitutional Court in Adjudicating a Law that Regulates Its Existence, Jurnal Konstitusi, Vol.12, No. 4, Edisi Desember.

Tony Prayogo, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13, No. 2.

Violla Reininda, Muhammad Ihsan Maulana, Rahmah Mutiara, 2020, *17 Tahun Mahkamah Konstitusi: Reorientasi Paradigma dan Rekonstruksi Kelembagaan*, Yayasan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Jakarta.

Wan Sulistiyo, Widayati, Sri Kusriyah, 2018, *Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal*, Jurnal Daulat Hukum Vol.1 No. 1, Edisi Maret.

Winda Wijayanti, 2013, *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No.1, Edisi Maret.

Yanis Maladi, 2010, *Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No.2, Edisi April.

Yusril Ihza Mahendra, 2002, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia (Catatan dan Gagasan)*, Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.

E. Internet dan Webinar

Aida Mardatillah, "*Revisi UU MK Dinilai Syarat Akan Kepentingan Politik*", www.hukumonline.com, 29 Agustus 2020, diakses pada 28 Februari 2021.

Bivitri Susanti, *Robohnya Demokrasi Kami* dalam Koran Tempo, 12 September 2020, diakses pada 28 Februari 2020.

Fitria Chusna Farisa, "*Revisi UU Mk Disebut Inkonstitusionalitas, Ini Sebabnyaa..*", www.kompas.com, 2 September 2020, diakses pada 28 Februari 2020.

<https://www.dpr.go.id/Undang-Undang/prolegnas>.

<https://www.instituteforgovernment.org.uk>, "*What Happens to Legislation When Parliament is Prorogued*", diakses pada 28 Oktober 2021.

<https://pshk.or.id/>, "*Revisi UU Mahkamah Konstitusi Dinilai Cacat Formil*", 30 Maret 2021, diakses pada 28 Oktober 2021.

<https://tempo.com>, "*Revisi Cepat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*", 2 September 2020. Diakses pada 28 Oktober 2021.

Haryanti Puspa Sari "*Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Diajukan Ketua Baleg DPR sebagai Pengusul Tunggal*", www.Kompas.com, diakses pada 26 Februari 2021.

Indriyani Astuti, "*Akan Masuk Putaran Konflik Kepentingan*" www.mediaindonesia.com, 21 Desember 2020, diakses pada 29 Februari 2021.

Jimly Asshiddiqie,” *Kedudukan Mahkamah Konstitusi*, www.jimly.com, diakses pada 23 Mei 2021.

Rini Kustiasih, “Hanya Dibahas Tujuh Hari, DPR Sahkan RUU Mahkamah Konstitusi”, www.kompas.com, 1 September 2020, diakses pada 28 Oktober 2021.

Sania Mashabi, "*PSHK: Pembahasan Revisi UU MK Secara Cepat dan Tertutup Cederai Semangat Reformasi*", www.kompas.com , 28 Agustus 2020, diakses pada 28 Oktober 2021.

Webinar “ *Menguji Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Kosntitusi*” pada 7 September 2020.

